

7. Urusan Tenaga Kerja

Urusan Tenaga kerja merupakan kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto PP No. 17 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Pembagian Urusan Pemerintahan; Bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan Urusan Pemerintahan:

1. Urusan Wajib Pemerintahan Bidang Tenaga kerja meliputi 4 Sub bidang dan 1 penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, yaitu :
 - a) Perencanaan Tenaga Kerja (ada 1 Kegiatan)
 - b) Pelatihan Kerja dan Produktivitas (ada 3 Kegiatan)
 - c) Penempatan Tenaga Kerja (ada 4 Kegiatan)
 - d) Hubungan Industrial (ada 2 Kegiatan)
 - e) Sekretariat (ada 6 Kegiatan)
2. Urusan Pilihan Pemerintahan Bidang Transmigrasi meliputi 2 Sub bidang, yaitu :
 - a) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (ada 1 Kegiatan)
 - b) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi (ada 1 Kegiatan)

Berdasarkan PERDA No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Sukabumi jo PERBUP Sukabumi No. 75 Tahun 2021 tentang SOTK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi, memiliki Tupoksi Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi melakukan Pemetaan dan Pemutakhiran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam RPJMD dan RENSTRA sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020.

Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan yang tercantum dalam DPA KU 01/910/26/DPA/2.07.3.32.0.00.01/2022 tanggal 03 Januari 2022, sesuai dengan hasil pemetaan Permendagri No. 90 Tahun 2019 dan Pemutakhiran sesuai Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020, yaitu didukung oleh 7 Program Wajib Non Pelayanan Dasar (4 Program Urusan Ketenagakerjaan dan 2 Program Urusan Transmigrasi) dan 1 Program Penunjang; 18 Kegiatan dan 45 Sub Kegiatan. Dengan jumlah pagu anggaran murni Rp. 11.291.686.047,00, pada bulan maret mengalami pergeseran pagu anggaran menjadi Rp. 12.335.218.247,00 (terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 1.043.532.200,00). Lalu pada bulan oktober terjadi perubahan pagu anggaran menjadi Rp. 15.227.818.113,00 (terjadi penambahan anggaran Rp. 2.862.599.866,00), dengan realisasi anggaran sampai dengan bulan Desember sebesar Rp. 14.999.877.367,00 atau 98,50 % terhadap pagu anggaran. Berikut diuraikan pelaksanaan program dan kegiatan urusan tenaga kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi sampai dengan bulan Desember pada tahun 2022.

1) Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 20.972.500,00. Sampai dengan bulan Oktober terealisasi sebesar Rp. 18.050.000,00 atau 86,07%. Program tersebut dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan sebagai berikut :

1.1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro, dengan alokasi anggaran Rp. 20.972.500,00, dengan realisasi sebesar Rp. 18.050.000,00 atau 86,7%. Kegiatan ini didukung dengan sub kegiatan yaitu :

1.1.1 Penyusunan rencana tenaga kerja mikro dengan alokasi anggaran Rp.20.972.500,00, dengan realisasi sebesar Rp. 18.050.000,00. Dengan keluaran sub kegiatan yaitu :

a. Jumlah dokumen RTK Mikro sebanyak 1 dokumen.

Adapun pencapaian program bisa dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja Tahun 2022		Capaian %
				Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya kapasitas dan produktivitas tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	92	95,24	103,52

2) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas. Peningkatan kualitas tenaga kerja dilakukan melalui pendidikan formal, pelatihan kerja dan pengembangan di tempat kerja sebagai satu kesatuan sistem pengembangan SDM yang komprehensif dan terpadu. Pelatihan kerja akan semakin penting peranannya dalam peningkatan kualitas tenaga kerja, dimana dibutuhkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan teknologi dan persyaratan kerja. Pelatihan kerja yang selama ini hanya mempertimbangkan *supply driven* diarahkan menjadi *demand driven*. Sasaran program adalah meningkatnya kapasitas dan produktivitas tenaga kerja. Anggaran belanja langsung yang disediakan untuk membiayai program ini yaitu, dengan alokasi pagu anggaran Rp. 231.370.660,00. Pada bulan Maret 2022 terjadi pergeseran pagu anggaran sebesar Rp. 1.244.902.860,00. Lalu pada bulan Oktober terjadi perubahan pagu anggaran sebesar Rp. 1.744.902.860,00, sampai dengan bulan Desember 2022 terealisasi sebesar Rp. 1.737.522.660,00 atau 99,58 %. Program tersebut dilaksanakan melalui 3 kegiatan dan 3 sub kegiatan sebagai berikut:

2.1. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi dengan alokasi anggaran Rp. 110.550.000,00, pada bulan maret terjadi pergeseran pagu anggaran setelah menjadi Rp. 1.124.082.200,00. Lalu pada bulan Oktober terjadi perubahan pagu anggaran sebesar Rp. 1.624.082.200,00, dan terealisasi sebesar Rp. 1.616.716.800,00 atau 99,55 %. Kegiatan ini didukung dengan sub kegiatan yaitu :

2.1.1 Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi dengan alokasi anggaran Rp.110.550.000,00, setelah pergeseran anggaran dibulan Maret menjadi Rp. 1.124.082.200,00. Lalu pada bulan Oktober terjadi perubahan pagu sebesar Rp. 1.624.082.200,00, dan teralisasi sebesar Rp. 1.616.716.800,00 atau 99,50 %. Dengan keluaran sub kegiatan sebagai berikut :

- Jumlah peserta pelatihan bidang keahlian teknik manufaktur institusional sebanyak 48 orang.
- Jumlah peserta bidang keahlian las industri SMAW institusional sebanyak 48 orang.
- Jumlah peserta bidang keahlian instalasi penerangan institusional sebanyak 48 orang.
- Jumlah peserta bidang keahlian perakitan komputer institusional sebanyak 48 orang.
- Jumlah peserta bidang keahlian teknik refrigeration intitusional sebanyak 48 orang.
- Jumlah peserta bidang keahlian furniture institusional sebanyak 48 orang.

- g. Jumlah peserta bidang keahlian CCPOA institusional sebanyak 48 orang.
- h. Jumlah peserta bidang keahlian teknik sepeda motor sebanyak 16 orang.

2.2. Pelaksanaan pembinaan lembaga pelatihan swasta yang memiliki kompetensi dengan alokasi anggaran Rp. 57.668.720,00, terealisasi sebesar Rp. 57.656.240,00 atau 99,98 %. Dengan sub kegiatan yaitu :

2.2.1 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dengan alokasi anggaran Rp. 57.668.720,00, terealisasi sebesar Rp. 57.656.240,00 atau 99,98 %, dengan keluaran sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Jumlah LPK swasta / BLK komunitas yang dibina sebanyak 75 Lembaga.

2.3. Pelaksanaan pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota dengan alokasi anggaran Rp. 63.151.940,00, terealisasi sebesar Rp. 63.149.620,00 atau 99,99 %. Dengan sub kegiatan yaitu :

2.3.1 Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja dengan alokasi anggaran Rp. 63.151.940,00, terealisasi sebesar Rp. 63.149.620,00 atau 99,99 %. Dengan keluaran sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Jumlah pengelola UKM pengolahan hasil pertanian yang meningkat kompetensi dan produktivitasnya sebanyak 30 Orang.

Adapun pencapaian program dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja Tahun 2022		Capaian %
				Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya kapasitas dan produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	2,3	6,58	286

Permasalahan

- Kurangnya sumber daya manusia dan rendahnya kesadaran para pengelola UKM untuk

3) Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 1.053.457.950,00, lalu terjadi perubahan pagu anggaran pada bulan Oktober menjadi Rp. 2.409.003.950,00. Sudah terealisasi sebesar Rp. 2.347.951.100,00 atau 97,47%. Program tersebut dilaksanakan melalui 4 kegiatan dan 8 Sub kegiatan, dengan uraian sebagai berikut :

3.1 Kegiatan pengolahan informasi pasar kerja, dengan alokasi anggaran Rp. 306.794.000,00, dengan realisasi Rp. 305.983.400,00 atau 99,74 %. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :

3.1.1 Pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar kerja online, dengan alokasi anggaran Rp. 300.000.000,00, terealisasi sebesar Rp. 299.189.400,00 atau 99,73 %, dengan keluaran sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Jumlah aplikasi yang dipelihara sebanyak 1 unit.

3.1.2 Peyananan dan penyediaan informasi pasar kerja online, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.794.000,00. Dengan realisasi Rp. 6.794.000,00 atau 100 %, dengan keluaran sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Jumlah peserta sosialisasi IPK online sebanyak 20 orang.

3.2 Kegiatan pelayanan antarkerja di daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran Rp. 515.084.450,00, lalu terjadi perubahan pagu anggaran pada bulan Oktober menjadi Rp. 1.865.084.450,00. Sudah terealisasi sebesar Rp. 1.820.625.200,00 atau 97,60 %. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :

- 3.2.1 Penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan, dengan alokasi anggaran Rp.33.004.000,00, dengan realisasi sebesar Rp. 28.031.000,00 atau 84,93 %, dengan keluaran sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah peserta pendamping disabilitas sebanyak 60 orang.
 - b. Jumlah tenaga kerja disabilitas yang ditempatkan sebanyak 60 orang.
- 3.2.2 Perluasan Kesempatan Kerja, dengan alokasi pagu anggaran Rp. 482.080.450,00, lalu pada bulan Oktober terjadi perubahan pagu anggaran menjadi Rp. 1.832.080.450,00 dengan realisasi anggaran Rp. 1.792.299.700,00 atau 97,83%. Dengan keluaran sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah tenaga kerja rabat beton sebanyak 792 orang di Kecamatan Cikidang, Parakansalak, Parungkuda, Sukabumi, Bojonggenteng, Simpenan, Kalapanunggal dan Kabandungan Kabupaten Sukabumi.
 - b. Jumlah tenaga kerja usaha mandiri pengolahan hasil pertanian sebanyak 20 orang di Kecamatan Sukaraja Kab. Sukabumi.
- 3.3 Kegiatan perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Rp. 135.597.500,00, lalu terjadi perubahan pagu anggaran sebesar Rp. 149.537.500,00 dengan realisasi anggaran Rp. 144.854.000,00 atau 96,87%. Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan, yaitu:
 - 3.3.1 Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI), dengan alokasi anggaran Rp. 43.000.000,00, lalu pada bulan Oktober terjadi perubahan pagu anggaran menjadi Rp. 26.940.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 22.262.000,00 atau 82,64%. Dengan keluaran sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Fasilitas pekerja migran Indonesia bermasalah (meninggal, sakit, kasus) sebanyak 20 orang.
 - 3.3.2 Penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran, dengan alokasi anggaran Rp. 70.500.000,00, pada bulan Oktober terjadi perubahan pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 100.500.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 100.495.000,00 atau 99,99%. Dengan keluaran sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Hibah Rp. 80.000.000,00.
 - b. Peserta Diseminasi tata cara kerja ke luar negeri sebanyak 50 Orang.
 - 3.3.3 Pemberdayaan pekerja migran indonesia purna penempatan, dengan alokasi anggaran Rp. 22.097.500,00, dengan realisasi anggaran Rp. 22.097.000 atau 99,99 %. Dengan keluaran sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah pekerja migran indonesia purna (yang mengikuti pembekalan kewirausahaan) sebanyak 16 orang.
- 3.4 Kegiatan penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota Rp. 95.982.000,00, pada bulan Oktober terjadi perubahan pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 87.588.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 76.783.000,00 atau 87,66 %. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu :
 - 3.4.1 Koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan alokasi anggaran Rp. 95.982.000,00, pada bulan oktober terjadi perubahan pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 87.588.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 76.783.000,00 atau 87,66 %. Keluaran sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah perusahaan pengguna tenaga kerja asing yang dibina 90 Perusahaan.

Adapun pencapaian program tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja Tahun 2020		Capaian %
				Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya kapasitas dan produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	28	26,06	93,07

Permasalahan

- Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan kegiatan pembinaan Perusahaan pengguna TKA, sehingga tidak tercapainya target.

Solusi

- Mengusulkan untuk penambahan Sumber Daya Manusia, sehingga bisa tercapainya target pembinaan tersebut.
- Melaksanakan diskusi interaktif melalui media Zoom Meeting kepada Perusahaan pengguna TKA.

Dampak

- Tidak maksimalnya pencapaian informasi tentang kebijakan-kebijakan TKA ke Perusahaan.

4) Program Hubungan Industrial

Program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 184.889.200,00, pada bulan Oktober terjadi perubahan pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 319.889.200,00. Realisasi anggaran sebesar Rp 290.990.550,00 atau 90,97%, program tersebut dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 8 Sub kegiatan, dengan uraian sebagai berikut :

4.1 Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan alokasi anggaran Rp.16.672.500,00, realisasi sebesar Rp 16.495.000,00 atau 98,94 %. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu :

4.1.1 Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan dengan alokasi anggaran Rp. 5.016.250,00, dengan realisasi sebesar Rp. 4.955.250,00 atau 98,78 %. Dengan keluaran sub kegiatan sebagai berikut :

a. Jumlah perusahaan yang mengesahkan peraturan perusahaan sebanyak 75 perusahaan.

4.1.2 Pendaftaran perjanjian Kerjasama bagi perusahaan dengan alokasi anggaran Rp. 6.417.250,00, dengan realisasi sebesar Rp. 6.300.750,00 atau 98,18 %. Dengan keluaran sub kegiatan sebagai berikut :

a. Jumlah perusahaan yang mengesahkan perjanjian kerja Bersama 25 perusahaan.

4.1.3 Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan dengan alokasi anggaran Rp. 5.239.000,00, dengan realisasi sebesar Rp. 5.239.000,00 atau 100 %. Dengan keluaran sub kegiatan sebagai berikut :

a. Profil ketenagakerjaan sebanyak 1 Dokumen.

4.2 Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 168.216.700,00, pada bulan Oktober terjadi perubahan pagu anggaran menjadi sebesar

303.216.700,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 274.495.550,00 atau 90,53%. Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu :

- 4.2.1 Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan alokasi anggaran Rp. 168.216.700,00, pada bulan Oktober terjadi perubahan pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 226.801.750,00. Realisasi sebesar Rp. 207.519.750,00 atau 91,50%. Dengan keluaran sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Fasilitasi dewan pengupahan kabupaten (rapat koordinasi dan honor, kajian kebutuhan hidup layak dan kemampuan perusahaan sebanyak 37 orang.
 - b. Fasilitasi hari buruh nasional (persipan hari buruh nasional, evaluasi hari buruh nasional dan forum group discussion (FGD)) sebanyak 100 orang.
 - c. Jumlah pencegahan kasus hubungan industrial sebanyak 36 kasus.
 - d. Sosialisasi peningkatan kapasitas anggota serikat pekerja/serikat buruh di Kabupaten Sukabumi sebanyak 292 orang.
- 4.2.2 Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan alokasi anggaran Rp. 12.985.750,00, realisasi anggaran sebesar Rp. 11.510.000,00 atau 88,64%. Dengan keluaran sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah penyelesaian kasus hubungan industrial sebanyak 35 kasus.
- 4.2.3 Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi dengan alokasi anggaran Rp. 10.071.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp. 10.065.800,00 atau 99,95 %. Dengan keluaran sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah serikat pekerja atau serikat buruh yang terbina sebanyak 50 serikat pekerja
- 4.2.4 Pelaksanaan operasional Lembaga Kerjasama tripartit daerah kabupaten/kota dengan alokasi anggaran Rp. 47.392.250,00, realisasi anggaran sebesar Rp. 41.560.000,00 atau 87,69%. Keluaran sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah fasilitasi LKS Tripartit (Rapat, Honorarium) sebanyak 27 orang.
- 4.2.5 Pengembangan pelaksana jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja dengan alokasi sebesar Rp. 5.965.750,00, realisasi anggaran sebesar Rp. 3.840.000,00 atau 64,37%. Dengan keluaran sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah perusahaan dan karyawan yang memahami pentingnya fasilitas kesejahteraan pegawai sebanyak 20 orang.

Adapun pencapaian program tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja Tahun 2022		Capaian %
				Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya kapasitas dan produktivitas tenaga kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	100	100	100

5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.757.772.237,00, pada bulan Oktober terjadi perubahan pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 10.619.826.103 dengan realisasi sebesar Rp. 10.510.826.557,00 atau 98,97%, program ini terdiri dari 6 kegiatan dan 22 sub kegiatan. Dengan uraian sebagai berikut :

- 5.1 Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.578.200,00, pada bulan Oktober terjadi perubahan pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 28.713.200,00 dengan realisasi sebesar Rp. 28.579.800,00 atau 99,54%, kegiatan tersebut terdiri dari 7 sub kegiatan yaitu :
- 5.1.1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.579.800,00, pada bulan Oktober terjadi perubahan pagu anggaran sebesar Rp. 7.859.800,00, dengan realisasi sebesar Rp. 7.836.800,00 atau 99,71%, dengan keluaran sub kegiatan yaitu :
- a. Jumlah dokumen perencanaan sebanyak 2 dokumen.
- 5.1.2 Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 0, keluaran sub kegiatan yaitu :
- a. Jumlah dokumen program dan kegiatan sebanyak 1 dokumen.
- 5.1.3 Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 748.400,00, dengan realisasi sebesar Rp. 748.400,00 atau 100%. Keluaran sub kegiatan yaitu :
- a. Jumlah dokumen program dan kegiatan perubahan sebanyak 1 dokumen.
- 5.1.4 Koordinasi penyusunan DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 975.600,00, dengan realisasi sebesar Rp. 975.600,00 atau 100 %, keluaran sub kegiatan yaitu :
- a. Jumlah dokumen program dan kegiatan sebanyak 1 dokumen.
- 5.1.5 Koordinasi penyusunan DPA-SKPD perubahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 873.000,00, dengan realisasi sebesar Rp. 873.000,00 atau 100%. Keluaran sub kegiatan yaitu :
- a. Jumlah dokumen program dan kegiatan perubahan sebanyak 1 dokumen.
- 5.1.6 Koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.715.400,00, dengan realisasi sebesar Rp. 8.715.000,00 atau 99,99%. Keluaran sub kegiatan yaitu :
- a. Jumlah laporan capaian kinerja sebanyak 1 dokumen.
- 5.1.7 Evaluasi kinerja perangkat daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.686.000,00, pada bulan Oktober terjadi perubahan pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 9.541.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.431.000,00 atau 98,85%, keluaran sub kegiatan yaitu :
- a. Urusan tenaga kerja dan urusan transmigrasi sebanyak 2 dokumen.
- 5.2 Administrasi keuangan perangkat daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.868.584.755,00, pada bulan Oktober terjadi perubahan pagu anggaran menjadi Rp. 8.478.409.721,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.404.557.216,00 atau 99,13%. Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan diantaranya sebagai berikut :
- 5.2.1 Penyediaan gaji dan tunjangan PNS dengan alokasi anggaran Rp. 7.853.727.925,00, pada bulan Oktober terjadi perubahan pagu anggaran menjadi Rp. 8.453.351.921,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.379.649.050,00 atau 99,13%, keluaran sub kegiatan tersebut yaitu :
- a. Gaji dan tunjangan PNS selama 14 bulan.
- 5.2.2 Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 2.788.000,00, dengan realisasi sebesar Rp. 2.788.000,00 atau 100 %. Keluaran sub kegiatan tersebut yaitu :
- a. Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan akuntansi sebanyak 12 laporan
- 5.2.3 Koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun dengan alokasi anggaran Rp. 1.219.000,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.219.000,00 atau 100 %. Keluaran sub kegiatan tersebut yaitu :
- a. Jumlah laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 laporan.
- 5.2.4 Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan dengan alokasi Rp. 608.000,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 500.000,00 atau 82,24 %. Keluaran sub kegiatan tersebut yaitu :
- a. Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan sebanyak 1 dokumen.
- 5.2.5 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/semesteran/triwulan/semesteran SKPD dengan alokasi Rp. 9.554.800,00,

- pada bulan Oktober terjadi perubahan pagu anggaran menjadi Rp. 19.565.800,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 19.539.800,00 atau 99,87%. Keluaran sub kegiatan yaitu :
- a. Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran sebanyak 14 Laporan.
- 5.2.6 Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran dengan alokasi Rp. 697.000,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 692.000,00 atau 99,28 %. Keluaran sub kegiatan yaitu :
- a. Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran sebanyak 1 laporan.
- 5.3 Administrasi umum perangkat daerah dengan alokasi anggaran Rp. 166.623.482,00, pada bulan Oktober terjadi perubahan pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 273.501.482,00 dengan realisasi sebesar Rp. 268.009.560,00 atau 97,99%. Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan diantaranya sebagai berikut :
- 5.3.1 Penyediaan peralatan rumah tangga dengan alokasi Rp. 14.510.610,00, dengan realisasi sebesar Rp. 14.510.610,00 atau 100%. Keluaran sub kegiatan tersebut yaitu :
- a. Tersedianya peralatan rumah tangga selama 12 bulan.
- 5.3.2 Penyediaan bahan logistik kantor dengan alokasi Rp. 45.291.332,00, pada bulan Oktober terjadi perubahan pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 115.457.332,00 dengan realisasi sebesar Rp. 115.456.800,00 atau 99,99%. Keluaran sub kegiatan tersebut yaitu :
- a. Jumlah ATK yang dibeli sebanyak 145 .
 - b. Tersedianya makanan dan minuman selama 11 bulan.
- 5.3.3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan alokasi Rp. 92.322.540,00, pada bulan Oktober terjadi perubahan pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 109.252.540,00 dengan realisasi sebesar Rp. 103.762.150,00 atau 94,97%. Keluaran sub kegiatan tersebut yaitu :
- a. Fasilitasi barang cetak dan penggandaan selama 12 bulan.
- 5.3.4 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan alokasi Rp. 14.499.000,00, pada bulan Oktober terjadi perubahan pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 34.281.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 34.280.000,00 atau 99,99 %, keluaran sub kegiatan tersebut yaitu :
- a. Terpenuhinya kegiatan rapat koordinasi selama 4 bulan.
- 5.4 Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.63.790.000,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 63.790.000,00 atau 100 %. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan diantaranya sebagai berikut :
- 5.4.1 Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya dengan alokasi Rp.63.790.000,00, dengan realisasi sebesar Rp. 63.790.000,00 atau 100 %. Keluaran sub kegiatan tersebut yaitu :
- a. Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli sebanyak 4 unit.
- 5.5 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.226.350.800,00, pada bulan Oktober terjadi perubahan pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 1.318.146.700,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.299.362.754,00 atau 98,57%. Kegiatan tersebut terdiri dari 2 sub kegiatan diantaranya sebagai berikut :
- 5.5.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan alokasi Rp. 246.000.000,00, pada bulan Oktober terjadi perubahan pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 207.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 200.335.814,00 atau 96,55%. Keluaran sub kegiatan tersebut yaitu :
- a. Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terpenuhi selama 12 bulan.
- 5.5.2 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan alokasi Rp.980.350.800,00, pada bulan Oktober terjadi perubahan pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 1.110.646.700,00. Dengan realisasi sebesar Rp. 1.099.026.940,00 atau 98,95%, keluaran sub kegiatan tersebut yaitu :
- a. Jasa keamanan kantor terpenuhi selama 13 bulan.
 - b. Jasa kebersihan kantor terpenuhi selama 13 bulan.

- c. Jasa surat menyurat terpenuhi selama 13 bulan.
- d. Jasa tenaga supir terpenuhi selama 13 bulan.
- e. Jasa Instruktur senam selama 13 bulan.
- f. Jasa pengajian rutin Majelis Ta'lim selama 13 bulan.

5.6 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 415.845.000,00, pada bulan Oktober terjadi perubahan pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 457.265.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 446.695.593,00 atau 97,69%. Kegiatan tersebut terdiri dari 2 sub kegiatan diantaranya sebagai berikut :

5.6.1 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan alokasi Rp. 245.762.000,00, pada bulan Oktober terjadi perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 272.762.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 265.245.464,00 atau 97,24%. Keluaran sub kegiatan tersebut yaitu :

- a. Jumlah kendaraan yang dipelihara sebanyak 6 unit.

5.6.2 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan alokasi Rp. 170.083.000,00, pada bulan Oktober terjadi perubahan pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 184.503.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 181.451.129,00 atau 98,35%. Keluaran sub kegiatan tersebut yaitu :

- a. Jumlah kendaraan yang dipelihara sebanyak 30 unit.

Urusan Transmigrasi

Urusan Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) melalui 2 (dua) program yang terkait langsung dengan pencapaian kinerja, yaitu Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Isu Strategis dari 2 (dua) program ini adalah tingkat penyebaran penduduk yang belum merata, rendahnya pendapatan masyarakat pelaku sektor pertanian dan rendahnya kepemilikan lahan pertanian. Latar belakang program ini adalah bahwa minat masyarakat untuk bertransmigrasi masih tinggi serta banyaknya buruh tani dan petani gurem kecil di Kabupaten Sukabumi. Tujuan dari 2 (dua) program ini adalah mewujudkan masyarakat transmigrasi yang berkualitas. Sasarannya adalah meningkatnya animo masyarakat dalam pengembangan kawasan transmigrasi Lokal dan luar Pulau Jawa. Sedangkan indikator program ini adalah persentase jumlah KK transmigran yang difasilitasi dan persentase jumlah KK transmigran yang dilatih. Alokasi pagu anggaran yang disediakan untuk membiayai urusan transmigrasi ini sebesar Rp. 43.223.500,00, pada bulan maret mengalami pergeseran pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 73.233.500,00. Pada bulan Oktober terjadi perubahan pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 113.223.500,00, terealisasi sebesar Rp. 94.536.500,00 atau 83,50 %. Urusan Transmigrasi tersebut dilaksanakan melalui 2 program dan 2 kegiatan serta didukung dengan 3 sub kegiatan sebagai berikut :

1) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.531.000,00, setelah mengalami pergeseran anggaran dibulan maret menjadi Rp. 45.531.000,00. Pada bulan Oktober terjadi perubahan pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 70.531.000,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 54.166.500,00 atau 76,80%. Program ini didukung dengan 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan yaitu :

1.1 Kegiatan Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp. 15.531.000,0, mengalami pergeseran anggaran di bulan maret menjadi Rp. 45.531.000,00. Pada bulan Oktober terjadi perubahan pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 70.531.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 54.166.500,00 atau 76,80%, kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu ;

1.1.1 Pemindahan dan penempatan transmigran yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00, pada bulan Oktober terjadi perubahan pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 55.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 41.252.500,00 atau 75%. Dengan keluaran sub kegiatan yaitu :

a. Jumlah KK yang ditempatkan 3 KK.

1.1.2 Penyuluhan transmigrasi dengan anggaran sebesar Rp. 15.531.000,00, dengan realisasi sebesar Rp. 12.914.000,00 atau 83,15%. Dengan keluaran sub kegiatan yaitu :

a. Jumlah masyarakat transmigran lokal yang terbina sebanyak 1 lokasi, yang terdiri dari Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi.

Adapun pencapaian program tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja Tahun 2022		Capaian %
				Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya jumlah transmigran yang terfasilitasi	Persentase jumlah KK transmigran yang difasilitasi	%	20	12	60

Permasalahan

- Berkurangnya kuota pemberangkatan yang semula target 5 KK menjadi 3 KK, berdasarkan surat pemberitahuan dari Dirjen P2KT dan Surat dari Disnakertrans Provinsi Jawa Barat.
- Menunggunya kepastian anggaran untuk kegiatan penyuluhan transmigrasi, sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut tidak maksimal karena waktu yang sangat terbatas di akhir tahun.

Solusi

- Mengusulkan ke Pemerintah Pusat agar target kuota pemberangkatan sesuai dengan perencanaan awal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, agar target bisa tercapai.
- Terhadap kegiatan baku yang sudah direncanakan diharapkan anggaran tidak ada perubahan, sehingga tercapainya target sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Dampak

- Adanya rasa kekecewaan dari calon transmigran karena tidak adanya kepastian keberangkatan transmigrasi ke Pulau Jawa.
- Kurang tersampainya informasi program ketransmigrasian kepada wilayah yang telah ditentukan, sehingga kurangnya masyarakat akan adanya Program Ketransmigrasian yang ada di Kabupaten Sukabumi.

2) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 27.692.500,00, pada bulan Oktober terjadi perubahan pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 42.692.500,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 40.370.000,00 atau 94,56%. Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :

2.1 Kegiatan pengembangan satuan pemukiman pada tahap kemandirian dengan anggaran sebesar 27.692.500,00, pada bulan Oktober terjadi perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 42.692.500,00 terealisasi sebesar Rp. 40.370.000,00 atau 94,56%. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :

2.1.1 Penguatan SDM (Sumber Daya Manusia) dalam rangka kemandirian satuan pemukiman dengan anggaran sebesar Rp. 27.692.500,00, pada bulan Oktober terjadi perubahan pagu anggaran sebesar Rp. 42.692.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 27.285.000,00 atau 63,91%, dengan keluaran sub kegiatan yaitu :

- a. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi sebanyak 325 orang.

Adapun pencapaian program tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja Tahun 2022		Capaian %
				Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya jumlah transmigran yang terfasilitasi	Persentase jumlah KK transmigran yang dilatih	%	16,6	21,58	130

Permasalahan

- Kesadaran masyarakat translok terhadap penyelesaian administrasi bila adanya yang berhubungan dengan masalah biaya, sehingga mempengaruhi keterlambatan pencetakan sertifikat tanah.
- Masyarakat translok masih kurangnya mendapatkan pelatihan usaha Ekonomi dan Sosial Budaya.

Solusi

- Harus adanya sinkronisasi anatar Perangkat Desa maupun Kecamatan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menyampaikan informasi terkait Ketransmigrasian. Sehingga timbulnya kepercayaan masyarakat translok terhadap Program Ketransmigrasian.
- Mengusulkan kepada Pemerintah Daerah agar masyarakat translok mendapatkan pelatihan dan pembinaan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya.

Dampak

- Masyarakat translok belum mendapatkan kepastian hukum atas Hak Milik Lahan yang ditempatinya untuk kegiatan usaha dan tempat tinggal.
- Masyarakat translok tidak memiliki rasa kepercayaan diri dalam pengolahan lahan nya sehingga lokasi translok terhambat berkembang dalam Segi ekonomi maupun Sosial Budaya.